



PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2006-2012

Ovi Amalia Sari¹, Alamsyah², Zulfan³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas syiah Kuala

Email: oviamalia88@gmail.com

alamsyah@unsyiah.ac.id

zulfanfkip@yahoo.com.

ABSTRACT

The election of regional heads and deputy regional heads, both governors and deputy governors, as well as regents / mayors directly by the people constitute the realization of the basic rights of the people in selecting regional leaders. Through the election, the people of both ethnic minorities and ethnic minorities have the opportunity and sovereignty to determine the regional leaders directly, free, secret without intervention (autonomous). This research tries to reveal the Ethnic Chinese Ethnic Participation Participation in Banda Aceh City General Election Year 2006-2012. Specifically, this study aims are (1) to know the form of political participation of Chinese Ethnic in Banda Aceh City in Pemilukada year 2006-2012. (2) to know the level of political participation of Chinese Ethnic in Banda Aceh City in the 2006-2012 General Election. (3) to know the factors influencing political participation of Chinese Ethnic in Banda Aceh City in Pemilukada year 2006-2012. The approach used in this research is qualitative approach with historical method. This research data is sourced from KIP Kota Banda Aceh, Banda Aceh City Government, Kuta Alam Gampong Peunayong District, political party and ethnic Chinese in the context of ethnic Chinese participation in Banda Aceh City elections in 2006-2012. The data were collected using literature study techniques, documentation, and interviews. The literature study technique, examines the reverences that have relevance to the research problem. Documentation techniques, reviewing official documents of KIP institute of Kota Banda Aceh and Gampong Peunayong. Interview techniques, to obtain adequate data using in-depth interview techniques with subjects involved in ethnic Chinese political participation. Based on the results of data analysis, the findings of this study can be put forward as follows. (1) The form of participation of Chinese ethnic Banda Aceh City in the 2006 and 2012 Election is included in the conventional form. In the 2006 elections, the form of political participation by ethnic Chinese was only one form of political participation, namely voting. Whereas in the 2012 General Election the form of political participation of ethnic Chinese increased to five forms of political participation consisting of voting (voting), Determination of voter list, Discussing political issues, Following the campaign, Being a witness on the vote count. (2) The level of political participation of Chinese Ethnic of Banda Aceh City in 2006 Election reached 72.90% or 514 people exercising their voting right and 27,10% or 191 non-voters. In the 2012 General Election the political participation of Chinese ethnic Banda Aceh City increased to 84% or 633 using the voting rights and 16% or 121 people who did not exercise their suffrage. (3) Factors driving the political participation of ethnic Chinese in Banda Aceh City Election in 2006 is the factor of political awareness and environmental factors, while the inhibiting factors of political participation are daily activities and do not receive invitations. Factors driving the political participation of ethnic Chinese in Banda Aceh City Election in 2012 is a factor of

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah.

² Dosen Pembimbing I.

³ Dosen Pembimbing II.



political awareness and curiosity, while the factors that inhibit political participation are the daily activities of busyness and assumption that there is no ability. The conclusion of this research is the form of political participation of Chinese ethnic Banda Aceh City in the election of 2006 and 2012 including in the conventional form. Political participation of Chinese ethnic Banda Aceh City in the 2006-2012 election has increased at a fairly high level.

Keywords: Ethnic Chinese Political Participation, Banda Aceh City Election 200

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati/walikota secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Melalui pemilukada, rakyat baik etnis mayoritas maupun etnis minoritas memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, rahasia tanpa intervensi (otonom). Penelitian ini berusaha mengungkapkan Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006-2012. Secara khusus penelitian ini bertujuan adalah (1) untuk mengetahui bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh dalam Pemilukada tahun 2006-2012. (2) untuk mengetahui tingkat partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh dalam Pemilukada tahun 2006-2012. (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh dalam Pemilukada tahun 2006-2012. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Data penelitian ini bersumber dari KIP Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Kuta Alam Gampong Peunayong, partai politik, dan Etnis Tionghoa dalam konteks partisipasi politik Etnis Tionghoa pada pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2006-2012. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Teknik studi pustaka, menelaah referensi-referensi yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi, menelaah dokumen resmi kelembagaan KIP Kota Banda Aceh dan Gampong Peunayong. Teknik wawancara, untuk memperoleh data yang memadai menggunakan teknik wawancara mendalam dengan subjek yang terlibat dalam partisipasi politik Etnis Tionghoa. Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. (1) Bentuk partisipasi Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada Pemilukada tahun 2006 dan 2012 termasuk dalam bentuk konvensional. Pada Pilkada tahun 2006 bentuk partisipasi politik yang dilakukan Etnis Tionghoa hanya satu bentuk partisipasi politik yaitu Pemberian suara (voting). Sedangkan pada Pemilukada tahun 2012 bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa meningkat menjadi lima bentuk partisipasi politik yang terdiri dari Pemberian suara (voting), Penetapan daftar pemilih, Membicarakan masalah politik, Mengikuti kampanye, Menjadi saksi pada penghitungan suara. (2) Tingkat partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada Pemilukada tahun 2006 mencapai 72,90% atau 514 orang yang menggunakan hak pilihnya dan 27,10% atau 191 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilukada tahun 2012 partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh meningkat menjadi 84% atau 633 yang menggunakan hak pilihnya dan 16% atau 121 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. (3) Faktor pendorong partisipasi politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2006 yaitu faktor kesadaran politik dan faktor lingkungan, sedangkan faktor penghambat partisipasi politik yaitu faktor kesibukan kegiatan sehari-hari dan tidak menerima undangan. Faktor pendorong partisipasi politik Etnis Tionghoa pada Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2012 yaitu faktor kesadaran politik dan rasa ingin tahu, sedangkan faktor penghambat partisipasi politik yaitu faktor kesibukan kegiatan sehari-hari dan



anggapan belum ada kemampuan. Simpulan penelitian ini adalah bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada pemilu pada tahun 2006 dan 2012 termasuk dalam bentuk konvensional. Partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada pemilu pada tahun 2006-2012 mengalami peningkatan pada tingkat cukup tinggi.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Etnis Tionghoa, Pemilu Kota Banda Aceh 2006-2012.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting bagi demokrasi yang ideal dalam sebuah negara. Indikator demokrasi ditentukan oleh warga negara yang berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Partisipasi aktif masyarakat memberikan suara dalam suatu pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik yang paling dasar atau pun minimal.

Bentuk keikutsertaan dalam partisipasi merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara baik yang berasal dari kelompok mayoritas sampai kelompok minoritas keikutsertaan dalam aktivitas politik yang dapat mengakibatkan perilaku dalam memilih tidak hanya dilakukan oleh etnis mayoritas, dalam hal ini etnis minoritas Tionghoa terindikasi sebagai kelompok yang sangat enggan melaksanakan aktivitas politik.

Pemilu merupakan agenda penting dalam setiap daerah, bahkan menjadi agenda yang ditunggu-tunggu oleh oleh setiap warga negara. Reformasi tahun 1998 merupakan suatu momentum untuk mengubah tatanan kehidupan kebangsaan, dengan membuka kebebasan pada setiap warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Dengan adanya reformasi berdampak pada perubahan mekanisme pemilu dari sistem perwakilan ke sistem langsung yang diperjelas dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan mekanisme pemilu tersebut telah membuka ruang kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Partisipasi

politik tidak hanya berjalan dalam bentuk pemberian hak suara, melainkan adanya antusiasme warga mendaftar sebagai kontestan di Pemilu.

Indonesia merupakan negara fluralis baik dari etnis, budaya, dan bahasa, melihat dari berbagai macam etnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terdapat salah satu etnis yang disebut Etnis Tionghoa, etnis ini telah bermigrasi sejak abad ke-7 untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Mereka bekerja sebagai pedagang dan mempunyai hubungan baik dengan kaum pribumi (Usman, A. Rani, 2009:45). Perbedaan ini merupakan sumberdaya untuk saling melengkapi dalam membangun kehidupan bangsa yang konstruktif. Dalam konstitusi semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum. Setelah negara Indonesia merdeka orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, sesuai pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia Republik Indonesia yaitu: Yang menjadi warganegara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.

Etnis Tionghoa sebagai rakyat Indonesia merupakan unsur yang penting dalam sebuah pemerintahan negara mutlak menjadi prioritas sebagai pemerintah yang ideal. Etnis ini juga merupakan salah satu bagian integral bangsa Indonesia, karena itu Etnis Tionghoa memiliki peran yang sama dengan etnis-etnis Indonesia yang lain. Etnis Tionghoa juga mempunyai hak dan kewajiban



yang sama, tidak ada perbedaan peran berdasarkan etnis atau penggolongan apapun.

Sebagaimana halnya daerah lain di Indonesia, Pemerintah Aceh juga telah meyelenggarakan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun di sejumlah wilayah kabupaten kota di Pemerintah Aceh. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Banda Aceh, penduduk kota ini terdiri dari masyarakat mayoritas dan masyarakat minoritas. Etnis Tionghoa merupakan masyarakat minoritas, mereka pada umumnya beraktivitas sebagai pedagang, hanya sedikit yang melakukan aktivitas politik, atau rendah dibanding keterlibatan mereka dalam bidang ekonomi atau bisnis.

Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh politik diskriminatif dari para penguasa, adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.14 tahun 1967 melarang segala yang serba Tionghoa di Indonesia, termasuk agama, kepercayaan, ekspresi seni, kebudayaan maupun sastra, sehingga membuat Etnis Tionghoa selama ini bersikap dingin dan tak acuh terhadap politik baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal, fenomena dan streatif yang dikembangkan Etnis Tionghoa anti politik dan partisipasi politiknya rendah.

Setelah reformasi digulirkan sebagian besar payung hukum serta bentuk-bentuk diskriminasi telah dihilangkan, sehingga Etnis Tionghoa memiliki kesempatan dan ruang gerak yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kancah politik baik nasional maupun daerah. Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka terdapat dua tujuan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh tahun 2006-2012; (2) Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh tahun 2006-2012; dan (3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh tahun 2006-2012.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang (Maleong, 2007:5). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu suatu proses untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dan menganalisis secara kritis. Gottschalk (2006:39) mengemukakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara rekaman dan peninggalan masa lampau. Adapun prosedur atau langkah kerja yang digunakan mengacu pada prosedur yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2001:91) adalah sebagai berikut:

a) Pemilihan Tema

Penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006-2012” dijadikan sebagai persoalan pokok untuk diteliti. Hal ini bertitik tolak dari perubahan politik era reformasi yang memberikan kebebasan untuk berpolitik kepada seluruh warganegara Indonesia termasuk Etnis Tionghoa, yang sebelumnya sangat pasif dengan kegiatan politik.

b) Heuristik

Sumber yang akan dipakai terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer terdiri dari dokumen tertulis berupa laporan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh tentang hasil pemilihan Walikota, dan hasil wawancara dengan informan. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari hasil penelitian sebelumnya, tesis, skripsi, buku-buku referensi, majalah dan artikel-artikel yang penulis peroleh dari



berbagai badan perpustakaan, seperti Pustaka Unsyiah, Pustaka Wilayah Banda Aceh.

c) Verifikasi

Untuk memperoleh data-data yang outentik dan kredibel tentang “Partisipasi politik etnis Tionghoa pada pemilihan umum kepala daerah Kota Banda Aceh tahun 2006-2012”, maka seluruh sumber yang telah berhasil dikumpulkan peneliti uji kebenarannya secara kritis dan menyeluruh. Kritik sumber dilakukan secara ekstern dan interen, baik terhadap sumber-sumber dokumen, studi kepustakaan, maupun wawancara.

d) Interpretasi

Sumber yang sudah dikritik, selanjutnya di analisis untuk memperoleh beberapa variabel fakta tentang Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006-2012”.

e) Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan representasi kesadaran penulis sejarah dalam masanya, dan merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Setelah penjabaran fakta-fakta dari hasil penafsiran, maka langkah yang terakhir adalah menuangkan fakta-fakta ke dalam tulisan yang berbentuk cerita sejarah yang disebut penulisan sejarah. Penyusunan fakta-fakta tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, dan juga disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala.

Lokasi dan waktu penelitian

a) Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Kuta Alam, khususnya di Gampong Peunayong. Gampong ini merupakan wilayah yang pada umumnya berpenduduk Etnis Tionghoa. Oleh karena itu

cukup representativ untuk dijadikan lokasi penelitian.

b) Waktu penelitian

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini berlangsung. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan April 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan, dan akurat. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Dokumentasi

Teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data-data primer dari objek yang akan diteliti. Dalam kegiatan dokumentasi penulis akan mengumpulkan berbagai jenis data Pemilukada seperti daftar pemilih tetap Gampong Penanyong Kecamatan Kuta Alam, hasil perolehan suara pemilu tahun 2006-2012 yang terdapat di kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuta Alam.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan cara mewawancarai seseorang baik secara tidak langsung maupun langsung. Penulis terlebih dahulu menghubungi informan dan meminta waktu kapan dan dimana bisa melakukan wawancara. Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, maka penulis akan menggunakan alat wawancara seperti buku catatan untuk mencatat hasil percakapan, dan tape recorder yang berfungsi untuk merekam semua percakapan. Para nara sumber yang peneliti wawancarai adalah Ketua atau wakil ketua KIP Kota Banda Aceh periode 2006 sampai dengan 2012. Keuchik Gampong Peunayong, Ketua atau wakil ketua partai politik, tokoh masyarakat Etnis Tionghoa, pemilih warga Etnis Tionghoa, dan



tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kelurahan Penayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

c) Studi Pustaka

Pada kegiatan ini, penulis mengkaji berbagai buku bacaan baik dokumen hasil penelitian, majalah, artikel, buku-buku referensi. Guna memperoleh informasi awal tentang Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006-2012". Studi ini dilakukan di Perpustakaan FKIP Unsyiah, Perpustakaan Unsyiah, dan Perpustakaan Wilayah Banda Aceh.

d) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan prosedur yang berkaitan dengan metode sejarah yaitu setelah semua data baik primer maupun sekunder terkumpul, maka akan dilakukan kritik dengan cara mengklasifikasikan dan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk mendapatkan sumber yang dapat dipercaya. Setelah data autentik diperoleh, maka peneliti akan mengadakan interpretasi agar mendapatkan fakta tentang Partisipasi Politik Etnis Tionghoa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006-2012". Setelah penjabaran fakta, langkah selanjutnya ialah merangkaikan fakta itu ke dalam bentuk tulisan sejarah secara kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Geografis Wilayah Penelitian

Gampong Peunayong merupakan salah satu gampong sentral perdagangan yang ada di Kecamatan Kuta Alam. Luas wilayah Gampong Peunayong mencapai 36,1 Ha, dengan kapasitas jumlah penduduk dari tahun 2007 s/d 2012 sebesar 2.597 jiwa. Secara administratif Gampong Peunayong terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Garuda, Dusun Cendrawasih, Dusun Merpati, dan Dusun

Gajah Putih. Gampong Penayong berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Mulia

Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Aceh

Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh

Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Laksana

Keadaan Penduduk.

Jumlah penduduk Gampong Peunayong tahun 2007 sebesar 1756 jiwa, pada tahun 2008 menurun menjadi 1714 jiwa, dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 1673 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk gampong Peunayong meningkat menjadi 2985 jiwa, kemudian pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 2597 jiwa dengan rincian 1549 jiwa laki-laki dan 1048 jiwa perempuan.

Bentuk Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilukada Kota Banda Aceh Tahun 2006.

Bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa pada pilkada Kota Banda Aceh tahun 2006 dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang mereka lakukan adalah sebagai berikut:

a) Pemberian Suara (voting)

Bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa yang berlangsung pada pemilihan kepala daerah Tanggal 11 Desember 2006 telah menghasilkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Ada pun tingkat partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada pemilihan kepala daerah tahun 2006 dapat dilihat sebagai berikut:

Bentuk partisipasi Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh dalam pemberian suara (Voting) dapat dikategorikan cukup tinggi karena dari data di atas terlihat bahwa Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh sudah ada kesadaran politik untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat 72,90% Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh



menggunakan hak pilihnya untuk memilih walikota Banda Aceh. Selebihnya sebanyak 191 orang atau 27,10% dari keseluruhan daftar pemilih tetap tidak berpartisipasi dengan berbagai alasan, mereka ini menjadi kelompok apolitis atau golput (KIP Kota Banda Aceh Tahun 2006)

Sehubungan dengan tahapan pemungutan suara dengan warga Etnis Tionghoa, Responden (Wawancara: 8 Maret 2016) menyatakan bahwa:

“Sangat antusias warga pada acara ini khususnya dalam memberi suaranya pada pilkada itu, saya menyaksikan sendiri di TPS 3 tempat saya memilih sangat banyak masyarakat Etnis Tionghoa ikut memilih. Saya sendiri bersama keluarga dan tetangga sama-sama pergi ke TPS untuk nyoblos”.

Selanjutnya, responden (wawancara: 11 Maret 2016) menyatakan bahwa:

“Banyaklah kali itu warga kami dari etnis Tionghoa datang ke TPS secara sukarela untuk nyoblos sebagai tanda ikut serta memberikan suara dalam pilkada waktu itu. Banyak bertemu dengan teman-teman, saudara, dan tetangga di TPS 1”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasubbag Teknis dan Hupmas KIP Kota Banda Aceh bahwa:

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung semestinya mendapat perhatian yang sangat baik dari masyarakat itu sendiri karena sejak saat itu sudah positif terjadi perubahan dalam bidang politik, yaitu kekuasaan benar-benar sudah berada sepenuhnya di tangan rakyat. Menurut saya antusias masyarakat dari saudara-saudara kita Etnis Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh secara langsung tahun 2006, khususnya di desa Penayong sangat baik karena mencapai 72,90%. (Wawancara: 11 Maret 20016).

Demikian juga dengan pernyataan dari Kepala Dusun Merpati, bahwa partisipasi warga Etnis Tionghoa di Gampong

Peunayong sudah sudah cukup bagus, hal itu merupakan partisipasi yang dilakukan secara sukarela berdasarkan kesadaran masyarakat sendiri untuk memilih dan mendapatkan pemimpin yang berkualitas dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

“Menurut saya cukup bagus, walaupun hanya mencapai 72,90% suara warga Etnis Tionghoa Gampong Peunayong yang diperoleh oleh KIP Kota Banda Aceh tahun 2006. Jumlah suara kami tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa keinginan dan keikutsertaan dalam mengikuti pemilihan kepala daerah sangat tinggi”. (wawancara: Steph Nawi 7 Maret 2016)

Pada tahap pemungutan suara ini, warga Etnis Tionghoa yang berada di Gampong Peunayong sebagian besar mereka ikut memberikan suaranya pada pemilukada Kota Banda Aceh. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara yang relevan dengan data tabel di atas, yaitu banyak warga Etnis Tionghoa yang datang ke TPS di lingkungan mereka masing-masing untuk memberikan suara dengan kualitas partisipasi yang sangat konstruktif, seperti untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas, mendukung program pembangunan pemerintah, menggunakan hak suara sebagai warganegara, dan tindakan ini dilakukan secara sukarela.

b) Penetapan Daftar Pemilih

Pada tahap penetapan daftar pemilih peran aktif dari masyarakat dapat menjadi sebagai sarana transparansi dalam melaksanakan pencatatan daftar pemilih dan sekaligus membantu petugas agar tidak ada satu pun masyarakat di wilayah tersebut yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Sehubungan dengan partisipasi Etnis Tionghoa pada tahap penetapa daftar pemilih, responden (Wawancara: 7 Maret 2016) menyatakan bahwa:

Berdasarkan pengamatan saya dari dulu samapai pilkada 2006 warga Etnis Tionghoa, termasuk saya tidak ada yang melibatkan diri pada



kegiatan penetapan daftar pemilih tersebut. Warga Etnis Tionghoa hanya sebatas didata menjadi DPT. Kami sangat percaya kepada petugas pendataan tersebut, bahwa bapak-bapak petugas tersebut dapat mendata warga kami dengan benar. Lagi pun kami tidak biasa melakukan pekerjaan tersebut, selain dari itu kami terikat dengan kegiatan rutinitas. Sebaiknya kami untuk sementara jangan dilibatkanlah.

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik warga Etnis Tionghoa dalam bentuk penetapan daftar pemilih sangat rendah. Hal itu terlihat dari hasil wawancara tidak ada seorang pun yang berkeinginan dan terlibat dalam kegiatan pendataan penetapan daftar pemilih.

c) Membicara Masalah Politik

Warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada pilkada tahun 2006 tidak ramai membicarakan atau mendiskusikan masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa politik yang terkait. Hal ini kemukakan oleh responden (Wawancara: 11 Maret 2016) bahwa:

Saya sangat jarang mengikuti perkembangan pemilukada di media massa, karena tidak menjadi perhatian saya, mungkin belum terbiasa, hanya saya mengingat hari dan tanggal pelaksanaan pilkada untuk penyoblosan memberi suara di TPS. Saya juga sangat jarang membicarakan dan mendiskusikan mengenai pemilukada dengan sesama warga kami disini, mungkin hal seperti itu karena tidak biasa dilakukan baik di dalam keluarga maupun di keluarga kami disini. Masing warga kami hanya memfokuskan pada kegiatan rutinitas, ya jualan, jasa, membuat makanan dan minuman untuk dijual, itu saja

Hal yang serupa ditambahkan oleh responden (Wawancara: 12 Maret 2016) yang mengungkapkan bahwa:

Saya sangat jarang membicarakan calon walikota dan wakil walikota bersama teman-teman. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang calon kepala daerah tersebut, karena mereka tersebut pasti sudah memenuhi sejumlah persyaratan yang diperlukan oleh pemerintah, pasti sudah baik-baik semuanya. Saya dan teman-teman warga di sini setuju-setuju saja calon yang terpilih dalam pilkada itu. Selain dari itu saya belum merasa terbiasa dengan ngobrol politik, mungkin saya dan teman-teman yang lain sibuk dengan pekerjaan.

Penjelasan responden di atas bahwa membicarakan tentang pemilukada dan calon kepala daerah bersama teman-teman merupakan hal yang sangat jarang dibicarakan, karena mereka siapa saja yang tampil pasti sudah sesuai dengan prosedur ataupun mekanisme yang berlaku. Membicarakan masalah politik merupakan bentuk partisipasi yang mudah dilakukan oleh semua orang, namun warga Etnis Tionghoa tidak dapat melakukannya, dalam kenyataan tingkat partisipasi dalam bentuk membicarakan masalah politik sangat rendah.

d) Mengikuti Kampanye

Kampanye pemilu merupakan sarana pesta demokrasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dengan penekanan pada penyampaian visi dan misi dan program kerja. Warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh merupakan warga yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan politik seperti sosialisasi pemilu dan kampanye. Sehubungan dengan tahapan kampanye dengan warga Etnis Tionghoa, responden (Wawancara: 7 Maret 2016) menyatakan bahwa:

Warga masyarakat Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh merupakan masyarakat



yang kurang aktif, hal ini nampak ketika waktu KIP memberikan sosialisasi cara pencoblosan yang benar. Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh tidak aktif dalam mengikuti kampanye. Pihak KIP telah memberikan jadwal kampanye kepada setiap partai, terlihat dilapangan bahwa warga masyarakat Etnis Tionghoa tidak ada yang hadir.

Selajutnya pernyataan yang mempunyai maksud sama dengan ungkapan di atas dikemukakan oleh responden (Wawancara: 12 Maret 2016) bahwa:

Saya dan keluarga, serta teman-teman sekitar pada pilkada Kota Banda Aceh tahun 2006 hanya ikut mencoblos, sedangkan berkampanye tidak ikut karena benar-benar tidak ada waktu yang dikarenakan oleh pekerjaan, karena saya hanya sebagai pedagang, selain itu saya juga tidak mengetahui dengan jelas informasi yang berhubungan dengan kampanye, jadi saya tidak bisa datang.

Keikutsertaan warga etnis Tionghoa Kota Banda Aceh dalam kegiatan kampanye menjelang pemilu sangat kurang, keadaan tersebut dapat dilihat pada saat kampanye dilaksanakan di beberapa tempat dalam wilayah Kota Banda Aceh, dan khususnya di Lapangan Peunayong, terlihat tidak ada warga Etnis Tionghoa mengikuti kampanye terbuka dari calon walikota Banda Aceh dengan alasan sibuk dengan rutinitas sehari-hari, tidak mengetahui informasi, tidak suka dengan keramaian kegiatan politik, dan merasa tidak nyaman apabila diketahui umum memihak kepada salah satu calon walikota. Berdasarkan keadaan sosial politik tersebut, tingkat partisipasi politik dalam bentuk mengikuti kampanye sangat rendah.

e) Pendaftaran dan Penetapan calon Walikota Banda Aceh

Sehubungan dengan tahap pendaftaran dan penetapan calon walikota dengan warga Etnis Tionghoa, responden (Wawancara: 16 Maret 2016) menyatakan bahwa:

Saya sendiri dan masyarakat kami di sini Etnis Tionghoa keterbukaan politik selama ini baru sampai pada tingkat memberi semangat kepada kami, belum sampai mendalam, jadi benar-benar keadaan yang baru, mungkin kapan-kapan menjadi suatu kebutuhan seperti ya bapak-bapak dan ibu yang sudah mencalonkan diri dan yang sudah terpilih. Dan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tentunya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu, dalam hal ini saya pun belum jelas. Yang jelasnya kita harus mempunyai pengetahuan politik, pergaulan dibidang politik, ikut dalam partai politik, harus mengetahui permasalahan wilayah dari yang kecil-kecil sampai masalah yang besar. Menurut saya dapat saya pastikan untuk masa itu samapai sekarang warga Etnis Tionghoa belum ada, boleh dikatakan belum terpikirkan samasekali, untuk sekarang ini masih hanya sebatas memberikan suara.

Sehubungan dengan keterangan di atas dapat dinyatakan bahwa tidak adanya warga Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh yang mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu. Hal ini dikarenakan warga Etnis Tionghoa belum mengetahui dan belum mengerti secara mendalam permasalahan Kota Banda Aceh. Oleh karena itu lebih baik dilakukan oleh warga yang sudah teruji kapasitasnya. Kondisi ini juga menunjukkan motivasi warga Etnis Tionghoa masih sangat rendah dalam bentuk partisipasi politik tersebut.

f) Menjadi Saksi Pada Penghitungan Suara.

Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) setelah pemungutan suara berakhir, hal ini dicantumkan dalam Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pada tahap ini masyarakat dapat menghadiri dan mengawasi jalannya prosesi perhitungan



suara di TPS secara langsung agar proses perhitungan suara dapat berjalan secara jujur. Selain itu keterlibatan masyarakat pada tahap ini dapat dilakukan dengan menjadi saksi dari salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sehubungan dengan keterlibatan warga Etnis Tionghoa sebagai saksi pada tahapan penghitungan suara, responden (Wawancara: 8 Maret 2016) menyatakan bahwa:

Dalam kegiatan penghitungan suara baik saya sendiri maupun warga Etnis Tionghoa lainnya belum ada keinginan untuk turut serta sebagai saksi dalam hal ini. Mereka selain belum terbiasa dengan kegiatan ini juga di sibukkan oleh pekerjaan atau aktivitas mereka lainnya, selain dari itu juga dipengaruhi oleh keadaan warga kami yang baru saja mengalami musibah bencana gempa dan tsunami tahun 2004, jadi maklumlah banyak yang belum terbenahi, jadi setelah mencoblos langsung pulang untuk melakukan aktivitasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, partisipasi politik Etnis Tionghoa pada tahap ini hanya sebatas menghadiri untuk memberikan hak suara, tidak sampai pada tingkat menjadi saksi dalam proses penghitungan suara. Hal ini dikarenakan warga Etnis Tionghoa masih dipengaruhi oleh keadaan pembenahan kehidupan paska bencana gempa dan tsunami. Tindakan partisipasi politik ini juga didukung oleh kebiasaan sebelumnya bahwa mereka tidak pernah diikutsertakan sebagai petugas atau sebagai panitia pemilihan umum, namun proses pemilihan umum berlangsung dengan baik.

g) Menjadi Tim Sukses Calon Kepala Daerah

Sehubungan dengan bentuk partisipasi politik sebagai tim sukses warga Etnis Tionghoa, responden (Wawancara: 19 Maret 2016) mengemukakan bahwa:

Kegiatan Tim Sukses itu kan pekerjaan orang-orang besar politik orang-orang

bilang elit-elit politik, yang sudah memiliki kekuatan-kekuatan politik, kalau dalam bahasa kami sehari-hari sudah punya modallah, punya pengalaman, punya strategi, punya teman dan saudara banyak, percaya diri juga kuat. Sedangkan saya dan warga kami Etnis Tionghoa belum terpikirkan untuk itu dan belum ada keinginan untuk itu, jadi kami jalani seperti biasa sajalah, memilih kemudian selesai dan menjalani hidup sehari-hari berjualan dan lain-lain, karena warga kami sebagai tukang becak ada, sopir ada, pembantu ada, pemulung juga ada. Jadi dari dulu sampai sekarang tidak ada yang menjadi Tim Sukses calon walikota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, warga Etnis Tionghoa tidak pernah menjadi Tim Sukses, karena belum mempunyai kemampuan dan belum mempunyai pengalaman dalam bidang politik khususnya dalam bentuk partisipasi politik sebagai Tim Sukses.

h) Sebagai Pengurus Partai Politik

Keterlibatan warga Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh untuk ikut kepengurusan partai politik tahun 2006 belum ada yang berpartisipasi hal ini dikarenakan warga Etnis Tionghoa belum begitu merespon kebebasan berpolitik yang telah diberikan oleh pemerintah era reformasi, dan tidak ada ajakan yang serius dari kader partai yang ada di Kota Banda Aceh untuk bergabung dalam struktur keanggotaan partai politik

Buktinya dari berbagai partai yang ada di Kota Banda Aceh tidak ada satupun warga Etnis Tionghoa yang bergabung dalam partai tersebut. Tidak adanya minat warga Etnis Tionghoa bergabung dalam struktural partai disebabkan oleh banyak faktor seperti masih sangat dekat dengan pengalaman masa lalu, pendidikan politik, kesibukan sehari-hari sehingga sulit untuk membagi waktu antara bekerja dengan mengurus partai politik. Warga Etnis Tionghoa pada umumnya aktif pada organisasi kesukuan mereka seperti



“Perkumpulan Suku Hakka” (Wawancara: Hasan, Ketua Yayasan Viara Bakti Darma 23 Maret 2016).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006

a) Faktor Pendorong Partisipasi Politik

Faktor-faktor pendorong partisipasi politik yang mempengaruhi partisipasi politik warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2006, adalah sebagai berikut:

1) Kesadaran Politik

Berdasarkan kesadaran politik yang berasal dari dalam diri masyarakat, khususnya warga Etnis Tionghoa dalam Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2006, telah mendorong warga Etnis Tionghoa untuk berpartisipasi politik, dalam hal ini adalah dalam bentuk pemberian suara dalam pemilukada di daerahnya. Mereka menganggap perlu untuk memberikan suaranya karena suara mereka dalam Pemilukada di daerahnya akan menentukan kehidupan mereka dalam program pembangunan yang akan datang di daerah mereka sendiri yaitu Kota Banda Aceh.

Warga Etnis Tionghoa juga menyadari bahwa peran pemerintah sebagai pembuatan kebijakan semakin diakui dalam segala sektor. Warga Etnis Tionghoa menyatakan bahwa peran pemerintah pada masa depan akan mempengaruhi taraf hidup mereka, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dusun Merpati (Wawancara: Steph Nawi: 7 Maret 2016) bahwa:

Kami dari warga Etnis Tionghoa Penayong Kota Banda Aceh untuk kali ini merasa lebih bersemangat dalam menyikapi pilkada, paling tidak untuk memberi suara, walaupun yang lain-lainnya sudah disamakan dengan masyarakat umum. Tapi kami masih semacam wacana, mungkin masih perlu sosialisasi. Kami ingin ikut berpartisipasi khususnya atau hanya

memberi suara kami, untuk mendapatkan pemimpin atau kepala daerah kami yang akan datang yang benar-benar memperhatikan kebutuhan penduduk kota ini, memikirkan nasib rakyatnya dan kesejahteraan rakyatnya, yang jelasnya dapat memberikan suatu perubahan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, warga Etnis Tionghoa ikut serta dalam kegiatan politik karena mereka ingin mendapatkan pemimpin yang mampu membawa perubahan kearah lebih baik sesuai dengan permasalahan pembangunan di Kota Banda Aceh, sehingga kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh kedepan akan lebih baik dari sebelumnya.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh, walaupun mereka jarang membicarakan masalah politik sesama warga, tetapi ketika pada hari pemberian suara minat para warga bertambah meningkat untuk datang ke TPS karena merasa tidak nyaman, dan tidak enak dengan tetangga yang pada umumnya menyambut Pemilukada tahun 2006 dengan penuh kegembiraan dan harapan. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam (Wawancara: 18 Maret 2016) bahwa kedatangan masyarakat ke TPS untuk menggunakan hak suara karena tidak enak dengan tetangga, walaupun saya tidak tahu sebaiknya siapa yang akan saya pilih. Walaupun demikian antusias masyarakat pada saat pemungutan suara cukup tinggi. Selain dari itu keadaan lingkungan sangat kondusif sehingga dapat mendorong warga untuk berpartisipasi secara nyaman dan sukarela berdasarkan pilihan masing-masing warga.

b) Faktor Penghambat Partisipasi politik

Selain faktor pendukung partisipasi politik yang sudah dikemukakan di atas, faktor-faktor penghambat partisipasi politik juga bisa mempengaruhi partisipasi politik warga Etnis Tionghoa dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Banda Aceh tahun 2006. Faktor-



faktor yang bisa menghambat partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1) Kesibukan Kegiatan Sehari-hari

Kesibukan sehari-hari merupakan suatu hal yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Kesibukan sehari-hari pada umumnya berkaitan dengan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh suatu kelompok masyarakat. Berkaitan dengan faktor pekerjaan motivasi dalam mengikuti pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh tahun 2006 sangat rendah dikarenakan memilih istirahat di rumah, disebabkan tuntutan dari pekerjaan mereka, mereka cenderung menggunakan waktu yang diliburkan oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk melaksanakan Pemilihan sebagai waktu istirahat di rumah karena baru tiba pada pagi hari di Banda Aceh. responden (Wawancara: 20 Maret 2016) mengemukakan bahwa:

Sebagian warga etnis Tionghoa motivasi dalam pelaksanaan pemilihan Kota Banda Aceh tahun 2006 secara langsung sangat rendah, karena di sini wilayah perdagangan, jadi sebagian masyarakat secara kebetulan sudah ada perjanjian-perjanjian bisnis dengan teman-teman di Medan, dan ketika kembali ke Banda Aceh kami lebih banyak memilih perjalanan darat pada malam hari, dan sampai di Banda Aceh tentunya pagi hari berhubung keadaan badan terasa lelah makanya saya tidur. Oleh karena itu saya tidak datang ke TPS untuk mencoblos.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kerja masyarakat yang berakhir pagi hari menyebabkan sebagian pemilih warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh cenderung untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan atau golput, mereka tersebut bekerja pada sektor swasta dan sektor informal lainnya.

2) Tidak menerima undangan

Pemilukada Kota Banda Aceh yang berlangsung pada 11 Desember 2006 berlangsung dengan baik, namun masih ada warga Etnis Tionghoa yang tidak berpartisipasi disebabkan oleh persoalan teknis. Dalam hal ini penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid sehingga ada sebagian warga yang tidak terdaftar di DPT. Oleh karena itu mereka tidak menerima undangan untuk memilih saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Berkaitan dengan adanya warga yang tidak menerima undangan, responden (Wawancara: 29 Maret 2016), mengemukakan bahwa:

Pada pemilu kada tahun 2006 saya tidak mendapatkan undangan dan ada beberapa teman saya juga tidak mendapat undangan untuk memilih, jadi saya tidak datang ke TPS untuk memilih. Saya dan teman-teman pada hari itu saya bekerja seperti biasa mempersiapkan bahan-bahan jualan dan berjualan. Saya menyadari mungkin keadaan ini masih ada hubungannya dengan pengaruh musibah gempa dan tsunami yang lalu, tetapi tidak apa-apa juga masyarakat kita disini lebih banyak yang mendapat undangan untuk memilih. Ada juga warga kita di sini tidak ikut memilih karena belum aktif tinggal di sini, mereka tinggal bersama saudaranya di Medan sejak peristiwa gempa dan tsunami. Di Medan mereka juga tidak memilih karena KTP yang mereka miliki KTP Kota Banda Aceh, jadi sebagai semacam pengungsi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan, disebabkan persoalan teknis, khususnya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemegang kartu tanda penduduk yang terdaftar sebagai warga negara tetapi kehilangan hak pilih mereka sebagai warga negara karena mereka tidak tertera dalam DPT, sehingga mereka tidak menerima undangan untuk memilih



saat pemilihan kepala daerah berlangsung.

Bentuk Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilukada Kota Banda Aceh Tahun 2012

Bentuk partisipasi politik konvensional pada warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh yang banyak ditemui di lapangan yaitu bentuk partisipasi pemberian suara (Voting), bentuk ini merupakan bentuk yang paling banyak dijumpai dan merupakan bentuk yang paling umum dalam suatu pemilihan umum.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu sarana perwujudan partisipasi rakyat. Partisipasi politik dapat dijabarkan kedalam bentuk-bentuk aktivitas politik yang dilakukan oleh rakyat. Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya, demikian juga dengan pemilih warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh. Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pemberian Suara

Tingkat bentuk partisipasi politik warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh dalam Pemilukada Tanggal 9 April 2012 merupakan pencapaian partisipasi politik yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan dengan Pemilukada Tahun 2006 yang lalu, seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Gampong Peunayong (Wawancara: T. Mirwan Sahputra, 11 Maret 2016) sebagai berikut:

Pemilukada Tahun 2012 yang diikuti oleh warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh, khususnya di Gampong Penayong kami perhitungkan mengalami peningkatan sekitar 11%, dibandingkan pemilukada Tahun 2006, tingkat partisipasi warga Etnis Tionghoa hanya mencapai 73%, sedangkan Pemilukada 2012 tingkat partisipasi warga Etnis Tionghoa mencapai 84% dari daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh.

Peningkatan partisipasi politik warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh dalam

Pemilukada merupakan salah satu hasil dari peran KIP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun tingkat partisipasi warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada Pemilukada Tahun 2012 sebagai berikut:

Partisipasi politik warga Etnis Tionghoa dalam Pemilukada tahun 2012 merupakan pencapaian partisipasi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Pemilukada tahun 2006. Pada Pemilukada tahun 2012 terjadi peningkatan partisipasi politik warga Etnis Tionghoa sebesar 11%, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran politik warga Etnis Tionghoa untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemilukada. Tingkat partisipasi politik dalam bentuk voting dapat dilihat 633 orang atau 83,95% warga Etnis Tionghoa menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah kota Banda Aceh.

Tingkat ketidak hadirannya di TPS dalam Pemilukada 2012 mencapai sebanyak 121 orang atau 16,04%, mereka semuanya apatis (KIP Kota Banda Aceh Tahun 2012). Ada banyak alasan yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Pertama sehubungan dari mereka sedang bekerja di luar kota, kedua, manula yang sudah tidak mungkin datang ke TPS masih masuk ke daftar TPS. Ketiga, masyarakat benar-benar apatis. Keempat, ada kesibukan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan.

Sehubungan dengan tahapan pemungutan suara dengan warga Etnis Tionghoa, Steph Nawi (Wawancara: 7 Maret 2016) menyatakan bahwa:

Pemilukada pada waktu itu nampaknya sangat menarik perhatian warga kami di sini, cukup tinggi motivasi warga dalam tahap ini khususnya dalam memberikan suaranya dalam Pemilukada ini. Saya juga menyaksikan sendiri di TPS 4, tempat saya memilih pada umumnya warga etnis Tionghoa yang ikut memilih. Saya sendiri datang ke TPS bersama keluarga dan teman-teman secara sukarela untuk menggunakan hak suara sebagai rasa tanggung jawab



warganegara untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Calon walikota yang saya pilih hanya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan sesuai dengan visi dan misinya. Selain dari itu saya juga melihat pengalaman atau hasil kerja para calon walikota selama ini yang telah diberikan untuk pembangunan Kota Banda Aceh. Itu saja, politik uang, ancaman, pengerahan untuk kepentingan tertentu tidak ada di sini. Gampong kita sangat kondusif.

Pada tahap pemungutan suara ini, warga Etnis Tionghoa yang berada di Gampong Peunayong sebagian besar mereka ikut memberikan suaranya pada pilkada Kota Banda Aceh. Mereka menggunakan hak suara dengan memilih calon walikota berdasarkan visi, misi, program pembangunan, pengalaman, dan hasil kerja nyata yang telah berhasil dibuktikan selama ini untuk kemajuan pembangunan Kota Banda Aceh. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara yang relevan dengan data tabel di atas, yaitu terjadi peningkatan partisipasi warga Etnis Tionghoa yang datang ke TPS di lingkungan mereka masing-masing untuk menggunakan hak suaranya.

b) Penetapan Daftar Pemilih

Pada tahap penetapan daftar pemilih peran aktif dari masyarakat dapat menjadi sebagai sarana transparansi dalam melaksanakan pencatatan daftar pemilih dan sekaligus membantu petugas agar tidak ada satu pun masyarakat di wilayah tersebut yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Sehubungan dengan partisipasi warga Etnis Tionghoa pada tahap penetapan daftar pemilih, hasil (Wawancara: 30 Maret 2016) menyatakan bahwa:

Berdasarkan pengamatan saya, dan saya sendiri secara sukarela maksudnya bukan sebagai petugas resmi dalam bidang pendataan pemilih, saya sudah ikut memberikan informasi kepada petugas pendata pemilih tentang keadaan warga dalam rangka mengikuti pelaksanaan

Pemilukada tahun 2012 yang lalu. Kondisi ini mungkin agak berbeda dengan pemilu-pemilu yang lalu termasuk Pemilukada 2006, pada waktu itu kami terima saja data yang disampaikan oleh pihak kelurahan.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dusun Merpati, Steph Nawi (Wawancara: 11 Maret 2016) bahwa:

Saya sebagai kepala dusun Merpati dan dibantu oleh beberapa warga yang lain yang saya tunjuk sendiri untuk mendata semua warga dalam lingkungan dusun merpati yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Hasil pendataan tersebut kami validasi dan kami serahkan ke pihak kelurahan. Pihak kelurahan juga melakukan validasi ulang, sehingga warga Dusun Merpati terdaftar semua sebagai pemilih yang dicantumkan dalam DPT.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik warga Etnis Tionghoa dalam bentuk penetapan daftar pemilih sangat tinggi. Hal itu terlihat bahwa banyak warga Etnis Tionghoa berkeinginan dan terlibat dalam kegiatan pendataan penetapan daftar pemilih, perhatian dan motivasi warga untuk membantu baik secara formal maupun tidak formal sudah mulai ada. Apabila dibandingkan dengan Pemilukada tahun 2006, hal ini menunjukkan bahwa warga Etnis Tionghoa sudah mulai ada perubahan dalam menyikapi proses Pemilukada khususnya dalam bentuk partisipasi penetapan daftar pemilih.

c) Membicarakan Masalah Politi

Pada Pemilukada Kota Banda Aceh tahun 2012, warga Etnis Tionghoa sudah ada yang membicarakan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan peristiwa politik. Mereka mengikuti perkembangan Pemilukada di media massa dan membicarakan tentang Pemilukada dengan warga sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena ada hubungan persahabatan serta kekeluargaan antara



mereka yang ikut membahas tentang suasana Pemiluakada.

Berkaitan dengan membicarakan masalah politik responden (Wawancara: 18 Maret 2016), mengungkapkan bahwa:

Sehubungan dengan Pemiluakada yang sudah berlangsung pada tahun 2012 Saya kadang-kadang membicarakan calon walikota bersama teman-teman. Memilih calon pemimpin yang bertanggung jawab terhadap realisasi visi misinya, karena semua calon walikota menjanjikan akan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Membicarakan masalah ini tidak kami lakukan secara khusus, tapi sambil sarapan pagi diwarung-warung warga kami di Penayong.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa membicarakan calon walikota bersama teman-teman merupakan salah satu fenomena partisipasi politik baru dalam kalangan warga Etnis Tionghoa untuk saling memberi pendapat mengenai calon walikota yang akan memimpin nantinya. Hal yang dibicarakan lebih mengarah pada program dan karakteristik pribadi para calon walikota. Membicarakan masalah politik merupakan bentuk partisipasi yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang, namun tidak semua warga etnis Tionghoa dapat melakukannya dalam kenyataannya sebagian kecil mereka yang mulai suka membicarakan masalah politik.

c) Mengikuti kampanye

Kampanye merupakan suatu bentuk kegiatan politik, ikut serta dalam kampanye adalah suatu bentuk kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Apabila dibandingkan dengan pemiluakada tahun 2006, warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada Pemiluakada tahun 2012 sudah mulai menaruh perhatian dalam mengikuti kegiatan politik seperti sosialisasi pemilu dan kampanye. Berkaitan dengan hal ini Kasubag Teknis dan Hupmas KIP Kota

Banda Aceh, Syamsul Rizal (Wawancara: 11 Maret) menjelaskan bahwa:

Warga masyarakat Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh merupakan masyarakat yang sudah mulai tumbuh motivasi dalam kegiatan politik, boleh kita katakan mereka sudah mulai aktif sama dengan warga lainnya di kelurahan Peunayong. Hal ini nampak ketika waktu KIP memberikan sosialisasi cara pencoblosan yang benar, suasananya sudah sangat berbeda dengan sosialisasi Pemiluakada tahun 2006, warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh yang hadir dalam mengikuti sosialisasi cukup ramai. Warga Etnis Tionghoa juga sudah mulai aktif dalam mengikuti kampanye. Pihak KIP telah memberikan jadwal kampanye kepada setiap partai, terlihat di lapangan dalam Kota Banda Aceh bahwa sudah ada sebagian warga masyarakat Etnis Tionghoa yang hadir, mereka ingin melihat figur calon walikota, dan visi misinya.

Berkaitan dengan hasil wawancara di atas, kondisi yang sama juga dikemukakan salah seorang responden (Wawancara: 30 Maret 2016) bahwa:

Pada Pemiluakada walikota Kota Banda Aceh tahun 2012 yang lalu nampaknya ada perasaan, dan keinginan yang baru dari warga kami di sini, khususnya tentang kampanye. Pada saat itu saya dan beberapa teman sangat berkeinginan untuk mengikuti kampanye, keinginan ini didukung oleh kesempatan. Oleh karena itu kesempatan itu kami gunakan dengan baik untuk ikut kampanye, kegiatan ini dengan mudah dapat kami ikuti karena sebelumnya kami sudah menerima jadwal kampanye masing-masing calon walikota yang diberikan oleh petugas Pemiluakada. Tetapi lebih banyak juga warga kami yang tidak



mengikuti kampanye, sama juga dengan warga-warga kita yang lain, kalau datang semua bisa penuh lapangan peunayong ini. Tetapi kehadiran kami masih tertuju kepada calon walikota tertentu, jadi belum merata walaupun tempat kampanye di lapangan yang sama.

Keikutsertaan warga Etnis Tionghoa dalam kegiatan kampanye menjelang Pemilukada merupakan suatu fenomena kegiatan politik baru bagi warga mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada saat kampanye dilaksanakan di lapangan Peunayong, terlihat ada sebagian warga Etnis Tionghoa yang mengikuti kampanye. Kehadiran mereka belum merata untuk semua calon walikota, tetapi mereka masih mengarah kepada figur calon walikota tertentu. Pada umumnya ramai tidak ramai masyarakat yang hadir dalam mengikuti kampanye didasarkan pada tingkat kekuatan para calon walikota menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti kampanye.

d) Menjadi Saksi Pada Penghitungan Suara

Pada tahap ini masyarakat dapat menghadiri dan mengawasi jalannya prosesi perhitungan suara di TPS secara langsung agar proses perhitungan suara dapat berjalan secara jujur. Selain itu keterlibatan masyarakat pada tahap ini dapat dilakukan dengan menjadi saksi dari salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sehubungan dengan keterlibatan warga Etnis Tionghoa sebagai saksi pada tahapan penghitungan suara, Steph Nawi (Wawancara: 7 Maret 2016) menyatakan bahwa:

Dalam kegiatan penghitungan suara pada Pemilukada 2012 yang lalu baik saya sendiri maupun warga Etnis Tionghoa lainnya sebagian sudah ada yang menyaksikan proses penghitungan suara sampai proses pemilihan selesai, mungkin ini ada rasa ingin tahu secara langsung tentang kedudukan calon walikota yang dipilih menang atau tidak. Mulai saat itu nampaknya sudah mulai ada

keinginan untuk turut serta sebagai saksi.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh salah seorang responden, (Wawancara: 18 Maret 2016) bahwa:

Dalam tahapan ini menurut yang saya lihat warga Etnis Tionghoa dan termasuk saya sendiri juga sudah mulai ada keinginan untuk menyaksikan acara penghitungan suara pemilih sampai selesai. Oleh karena itu saya dan teman-teman secara sukarela menyaksikan acara tersebut sampai selesai, dan didukung oleh panitia Pemilukada, bapak-bapak itu merasa sangat senang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, partisipasi politik Etnis Tionghoa pada tahap ini tidak hanya sebatas menghadiri untuk memberikan hak suara, tetapi sudah mulai menjadi saksi secara sukarela dalam proses penghitungan suara dimasing-masing TPS. Mereka mengikuti proses pemilihan sampai dengan penghitungan suara untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS tersebut saat penghitungan dilakukan.

e) Sebagai Pengurus Partai Politik

Kegiatan Pemilukada memberi dampak positif bagi masyarakat dalam memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat. Pendidikan politik masyarakat termasuk warga Etnis Tionghoa dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas mereka. Hal tersebut juga dapat dilihat dari keaktifan mereka sebagai pengurus anggota partai politik. Dari berbagai informasi yang didapat bahwa warga Etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh pada umumnya dan di Gampong Peunayong khususnya sangat jarang menjadi pengurus anggota partai politik.

Berkaitan dengan keaktifan Etnis Tionghoa sebagai pengurus partai politik, Sulaiman Ali selaku ketua pembinaan organisasi dan keanggotaan PAN menyatakan bahwa di struktur keanggotaan partai yang mereka ketuai tidak ada salah satu pengurus yang berasal dari warga Etnis Tionghoa (wawancara: 11 Maret 2016)



Pernyataan di atas juga sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat, ST; MT selaku Sekretaris Partindo Banda Aceh bahwa warga Etnis Tionghoa belum ada yang berminat untuk menjadi pekerja partai politik. Mereka tidak aktif dan kurang begitu tahu tentang partai politik, selain itu para warga Etnis Tionghoa pada umumnya sibuk dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari sehingga mereka memilih tidak terlibat dalam kepemimpinan partai politik (wawancara: 23 Maret 2016)

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012

a) Faktor Pendorong Partisipasi Politik

Faktor-faktor pendorong partisipasi politik yang mempengaruhi partisipasi politik warga Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2012, adalah sebagai berikut:

1) Kesadaran Politik

Kesadaran pemilih warga Etnis Tionghoa untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2012 di Gampong Peunayong cukup banyak, mereka menganggap bahwa peran serta mereka untuk mensukseskan Pemilu harus mereka lakukan karena mereka adalah bagian dari Warga Negara Indonesia. Setiap warga yang sudah terdaftar dan diberi undangan untuk datang ke TPS adalah suatu keharusan. Berkaitan dengan hal ini, salah seorang informan (Wawancara: 30 Maret 2016) mengemukakan bahwa saya datang ke TPS untuk ikut memberikan suara sebagai salah satu dukungan secara langsung kepada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang. Berdasarkan visi misi para calon walikota semua sangat menarik dan sangat baik, namun kita harus memilih salah seorang yang paling dekat dengan kepercayaan kita, bahwa akan dapat membuat perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa warga Etnis Tionghoa melakukan kegiatan politik ini karena mereka ingin menggunakan hak pemilihnya sebagai

warga negara, dan ingin mendukung program pembangunan melalui pemimpin atau kepala daerah yang mereka percayakan mampu merealisasikan visi misinya.

2) Rasa Ingin Tahu

Pemilukada merupakan kegiatan politik yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk menggantikan kepemimpinan pemerintahan, Peristiwa politik ini dilihat dari sisi waktu menimbulkan rasa ingin tahu bagi beberapa pihak untuk bisa terlibat dalam proses Pemilu, khususnya mereka yang baru mencukupi umur atau pemilih pemula warga Etnis Tionghoa untuk berpartisipasi aktif.

Berkaitan dengan dengan rasa ingin tahu, salah seorang informan (Wawancara: 30 Maret 2016) mengemukakan bahwa dirinya baru pertama kali melakukan kegiatan pemilihan walikota Banda Aceh. Dia ingin melihat dan ingin mengetahui secara langsung kegiatan pemilihan. Oleh karena itu dia datang ke TPS memberikan hak suaranya untuk memilih walikota dan menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi kelompok pemilih pemula.

b) Faktor Penghambat Partisipasi Politik

1) Kesibukan Sehari-hari

Perlu kita ketahui bahwa warga Etnis Tionghoa di Gampong Peunayong bekerja sebagai pedagang, mempunyai kolega bisnis, dan saudara atau famili antar kota di Indonesia. Sebagian dari mereka sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, kadang-kadang menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan Pemilu. Mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka dari pada harus ikut serta dalam berbagai kegiatan Pemilu. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang informan (Wawancara: 31 Maret 2016) bahwa saya sudah memberitahukan kepada Kepala Dusun tidak dapat hadir ke TPS untuk memilih kepala daerah (walikota), karena satu hari sebelum Pemilu saya harus berada di Jakarta untuk suatu urusan bisnis dengan kolega di Jakarta, namun saya tetap mengingatkan anggota keluarga agar datang



ke TPS secara bergantian untuk menggunakan hak suara. Sedangkan responden yang lain (Wawancara: 20 Maret 2016) mengemukakan bahwa saya dan keluarga tidak dapat menghadiri pada pelaksanaan Pemilu karena harus melaksanakan pesta perkawinan adik saya di Medan.

2) Anggapan Belum Ada Kemampuan

Perasaan belum mampu merupakan suatu unsur yang bisa menghambat seseorang berpartisipasi dalam bidang politik, sehingga sebagian warga Etnis Tionghoa berpendapat bahwa yang berhak untuk menekuni kegiatan politik secara aktif adalah orang-orang yang mempunyai bakat dalam bidang politik, yang mempunyai kekuatan ekonomi biaya politik, berpendidikan, dan orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik. Unsur-unsur tersebut pada umumnya belum dimiliki oleh warga Etnis Tionghoa, oleh karena itu hingga saat ini belum ada muncul sebagai pelaku-pelaku politik aktif di Kota Banda Aceh (Wawancara: 30 Maret 2016).

Hal yang sama dikemukakan oleh responden yang lain, (Wawancara: 30 Maret 2016) bahwa merasa malu untuk ikut dalam kepanitiaan Pemilu karena belum terbiasa berbicara di depan umum dan harus berhadapan dengan orang banyak. Responden lain (Wawancara: 12 Maret 2016) juga mengemukakan pandangan yang sama bahwa untuk menjadi sebagai panitia Pemilu belum berani dan masih ragu-ragu karena belum pernah terlibat dalam kepanitiaan pemilu. Oleh karena itu panitia pemilu sebaiknya dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman.

PENUTUP

1) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diberikan beberapa kesimpulan tentang Partisipasi politik Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh tahun 2006-2012 sebagai berikut:

- a) Bentuk partisipasi Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada Pilkada tahun 2006 dan 2012 termasuk dalam bentuk konvensional. Pada Pilkada tahun 2006 bentuk partisipasi politik yang dilakukan Etnis Tionghoa hanya satu bentuk partisipasi politik yaitu Pemberian suara (voting). Sedangkan pada Pemilu tahun 2012 bentuk partisipasi politik Etnis Tionghoa meningkat menjadi lima bentuk partisipasi politik yang terdiri dari Pemberian suara (voting), Penetapan daftar pemilih, Membicarakan masalah politik, Mengikuti kampanye, Menjadi saksi pada penghitungan suara.
- b) Tingkat partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh pada Pilkada tahun 2006 mencapai 72,90% atau 514 orang yang menggunakan hak pilihnya dan 27,10% atau 191 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilu tahun 2012 partisipasi politik Etnis Tionghoa Kota Banda Aceh meningkat menjadi 84% atau 633 yang menggunakan hak pilihnya dan 16% atau 121 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya.
- c) Faktor pendorong partisipasi politik Etnis Tionghoa pada Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2006 yaitu faktor kesadaran politik dan faktor lingkungan, sedangkan faktor penghambat partisipasi politik yaitu faktor kesibukan kegiatan sehari-hari dan tidak menerima undangan.
- d) Faktor pendorong partisipasi politik Etnis Tionghoa pada Pemilu Kota Banda Aceh tahun 2012 yaitu faktor kesadaran politik dan rasa ingin tahu, sedangkan faktor penghambat partisipasi politik yaitu faktor kesibukan kegiatan sehari-hari dan anggapan belum ada kemampuan.

2) Saran

- a) Sebaiknya lembaga penyelenggaraan pemilu bekerjasama yang berkesinambungan dengan lembaga



pendidikan, Ormas untuk terus mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat pada umumnya dan kepada warga Etnis Tionghoa khususnya, sehingga dapat merangsang keinginan politik warga Etnis Tionghoa untuk berpartisipasi lebih luas dalam dunia politik.

- b) Sebaiknya warga Etnis Tionghoa dapat membuka diri untuk menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik, serta menghilangkan perasaan belum mampu atau belum pantas dalam kegiatan politik.
- c) Penelitian mengenai Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banda Aceh, sebaiknya dapat dilanjutkan kembali oleh peneliti-peneliti lainnya, karena kehidupan sosial politik selalu berubah sesuai dengan dinamika masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Hadriansyah Putra, Dedi. 2009. "Partisipasi Masyarakat Etnis Tionghoa (Studi Kasus Pada Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Bengkulu)". Thesis: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIB,(Online), (<file:///C:/DOCUME-1/User/LOKAL-1/Temp/RarSDI18.282/PARTISIPASI POLITIK M...>)
- Herizal. 2012. "Partisipasi Politik Warga Negara Dalam Pemilihan Walikota Banda Aceh Tahun 2012". Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UNSYIAH.
- Heni. 2013. "Partisipasi Politik", (Online), ([http://heni.superwoman.blogspot.co.id/...](http://heni.superwoman.blogspot.co.id/))
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Maleong, Laxy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mas'oed, Mochtar dan Colin Mac Andrew.1986.*Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mahdalena, Lidya. 2010. Tingkah Laku Politik Etnis Tionghoa Pada Pemilukada 2010 di Kota Medan. *Jurnal Dinamika Politik/Vol.1/No.2/Oktober 2012*. Medan: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Medan.
- Maran,Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdiansyah, Bambang. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu. (Online), (<file:///C:/Documen and Sittings/User/My Dokuments/Partisipasi Politik...>).
- Paramita,Sinta. 2014. *Komunikasi politik dan Demokrasi Etnis Tionghoa Dalam Pemilu 2014 di DKI.Proceeding Konferensi Nasional Komunikasi Politik*. Malang: Prodi Ilmu



Komunikasi Universitas Brawijaya,
(Online).

Rush, Michael dan Althoff, Phillip. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Riadi, Muchlisin. 2014. “ *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*”, (Online), ([www.kajianpustaka.com>politik/pemilihan-kepala-daerah-pilkada.html](http://www.kajianpustaka.com/politik/pemilihan-kepala-daerah-pilkada.html)).

Syafiie, H. Ibnu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Soesilo, Arie S. 2005, *Sosiologi Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

SyarbainiSyahrial, dkk. 2011. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Paramita,Sinta. 2014. *Komunikasi politik dan Demokrasi Etnis Tionghoa Dalam Pemilu 2014 di DKI: Proceeding Konferensi Nasional Komunikasi Politik*. Malang: Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya.

Usman, A. Rani. 2009. *Etnis Cina Perantauan di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.